

KAJIAN GENDER BIDANG EKONOMI DI KABUPATEN WONOSOBO

Oleh:

Hariyati M.T Endang Kartini Panggiarti
(Jurusan Ekonomi Pembangunan dan Akuntansi
Fakultas Ekonomi)

ABSTRACT

The purpose of the research is to investigate about gender of economics. That is to find out about the objective condition the micro, small and medium for women business, the strategy to sustainable to make the business sustain, the problem that is faled and assistance model that need it. The research method is explanation descriptive analysis. The outcome of the research is Kabupaten Wonosobo has 10.371 industry business unit of low and medium class of house hold at 2006 and use 21.257 workers. The kind of industries that is produced from this sector is the industry of food manufacture, cloth, leather, metal. Sector food manufacture is highest sector. That is about 60% of all industry unit. Besides that, assistance for women business has done by government and non government institution, such as capital, instruments, training etc. But there are also sectors that are not touched even they are reluctant to get the capital. On the decision making process in the organisation, men has a impacting. For proposal to the DPRD has to affitiate witg parpol.

Key Words : gender of economics, indurtries, capital

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ketertinggalan Perempuan

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan sumberdaya manusia, baik laki-laki dan perempuan. Namun setelah tiga dasa warsa pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia belum mampu mewujudkan kesetaraan gender sebagai wujud HAM¹ (www.menegpp.go.id). Dalam berbagai hasil pembangunan capaian perempuan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Salah satu indikatornya adalah masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan. Ketertinggalan perempuan tersebut antara lain pada bidang pendidikan (termasuk pendidikan tinggi), kesehatan, partisipasi di sektor publik (ekonomi dan ketenagakerjaan), keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan baik di lembaga politik (legislatif), lembaga pemerintahan (eksekutif), lembaga penegak hukum (yudikatif).

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih banyak yang bias gender dan atau diskriminatif terhadap perempuan. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, terutama dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa posisi dan peran perempuan dalam berbagai aktifitas dalam pembangunan masih lebih rendah dari laki-laki. Hasil Sensus Penduduk (BPS, 2006), jumlah penduduk Indonesia tercatat 226 juta, dengan proporsi penduduk perempuan hampir 53%.

¹ Dalam *Human Development Report* (HDR) tahun 2004, *Human Development Indicator* (HDI) Indonesia sebesar 0,691 (HDR 2003) dan menempati urutan ke 111 dari 177 negara yang diukur. Sedangkan nilai *Gender Development Index* (GDI) sebesar 0,677 dan menempati urutan ke 91.

Kondisi Perempuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PUMKM)

Secara nasional, usaha kecil memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menyerap tenaga kerja sebesar 91%. Berdasarkan informasi ASPPUK, 80% usaha kecil berada di industri kecil perdesaan dan setengahnya adalah perempuan. Usaha kecil juga menjadi penghasil devisa dan penyedia jasa yang murah bagi sektor usaha besar, di samping sosial politis yang lain (CH, Tatik, 1997, Dikutip dari TOR Jambore Perempuan Usaha Kecil tahun 2002, Surakarta).

Sebenarnya kaum perempuan miskin bukanlah kelompok masyarakat yang statis. Mereka manusia yang dinamis ingin menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan sosial yang pesat di era globalisasi ini. Bagi perempuan miskin, bekerja keras merupakan suatu keharusan dengan motif untuk memenuhi kebutuhan standar minimum yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Data tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan oleh perempuan belum ter-cover pada data statistik di hampir seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Demikian pula data pilah tentang keterlibatan laki-laki dan perempuan hampir belum dimiliki oleh masing-masing wilayah.

Tujuan utama penelitian ini adalah ingin mengetahui lebih dalam tentang kajian gender bidang ekonomi yaitu mengungkapkan kondisi obyektif perempuan usaha mikro, kecil dan menengah, strategi dalam mempertahankan kelangsungan hidup usaha, permasalahan yang dihadapi dan model pendampingan yang diperlukan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro (Undang-undang No.20 tahun 2008). Adapun kriteria usaha mikro sebagai berikut: 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil mempunyai batasan dan definisi yang berbeda dari masing-masing lembaga atau institusi. Menurut UU No.9/1995 Usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, termasuk di dalamnya sektor informal serta usaha tradisional yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat. Dengan kriteria kekayaan bersih Rp200 juta atau penjualan tahunan paling sedikit sebesar Rp1 milyar. Sedangkan bentuk usahanya perorangan, tidak mempersoalkan badan hukum atau tidak, termasuk koperasi. Menurut undang-undang No.20 tahun 2008, kriteria pengusaha kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Menurut Jim Schell (1996) berdasarkan pengalaman di Amerika ciri-ciri Pengusaha Kecil adalah : 1) Usaha Kecil menganggap konsumen adalah raja, 2)

Usaha kecil sering berubah dan berubahnya dalam waktu yang sangat cepat, 3) Mempunyai tenaga kerja yang masing-masing mempunyai keunikan tersendiri. Tantangan utama dalam usaha kecil adalah kreatifitas dan pengambilan resiko. Keuntungan datang lebih dulu dari pada penghargaan.

Perempuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PUMKM)

Perempuan Pengusaha Kecil menurut Andriani dkk (1977:5) adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan kapasitas serta kapabilitas perempuan untuk mengontrol kehidupan beserta sumberdaya dalam tatanan masyarakat secara luas. Dengan ciri: skala bisnisnya Rp50.000,- s/d 1 juta, omzetnya kurang dari Rp1,5 juta, tenaga kerjanya kurang dari lima orang, manajemennya sederhana, misalnya dengan melakukan pembukuan yang sederhana dan statusnya tidak berbadan hukum”.

Berbicara tentang perempuan pengusaha kecil-mikro kita tidak lepas berbicara soal peminggiran dan marjinalisasi. Presentase perempuan yang bekerja atau terlibat dalam industri kecil jumlahnya relatif besar bila dibanding dengan lelaki, namun celaknya jumlah besar itu tidak memberi kontribusi signifikan bagi perempuan, dalam hal ini pengembangan perempuan dan usaha kecil-mikro (Andriani, 2000). Tengok saja data tahun 1993, hampir sepertiga bagian dari total pekerja industri kecil merupakan pekerja perempuan dan hampir sepertiga bagian dari jumlah tersebut, merupakan pekerja yang tidak dibayar atau pekerja keluarga (30,80%), runyamnya

sebagian besar tenaga kerja yang tidak dibayar tersebut adalah perempuan (Priyono, 1999, 1).

Isu Gender - Marjinalisasi Gender dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Begitu banyak jenis usaha kecil yang dilakukan perempuan, seperti perdagangan, industri makanan, konveksi, dan jasa. Jenis usaha ini, seringkali diusahakan secara mandiri atau sebagai bagian dari sistem produksi keluarga. Usaha kecil yang dikelola perempuan terus berkembang, terutama pada paska krisis ekonomi. Di tengah situasi krisis seperti sekarang ini, usaha kecil memberikan harapan bagi kelompok miskin untuk dapat mempertahankan kelangsungan kehidupannya karena mereka mampu menyerap banyak tenaga kerja. Namun, masih banyak masalah dan hambatan yang dialami perempuan usaha kecil, baik hambatan dari sisi usaha maupun hambatan budaya patriarkhi.

Menurut Fakih (1996, 72-76) menyatakan terdapat lima bentuk ketidakadilan gender dalam kehidupan (pembangunan) termasuk bidang ekonomi. Bentuk ketidakadilan itu adalah:

1. Marginalisasi (pemiskinan ekonomi) lemahnya perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi, seperti tanah, kredit dan pasar. Banyak perempuan desa tersingkirkan dan menjadi miskin akibat program. Revolusi Hijau yang hanya diperuntukkan bagi petani laki-laki, sehingga yang mendapatkan bantuan kredit hanya petani laki-laki saja.
2. Subordinasi (penomorduaan); dalam rumah tangga atau dalam masyarakat keputusan untuk mengambil kebijakan "perempuan dianggap tidak penting", perempuan tidak memiliki peluang untuk mengambil keputusan yang

menyangkut dirinya.

3. *Stereotype* (pelabelan negatif); laki-laki adalah pencari nafkah, perempuan hanya dikatakan sebagai pencari "tambahan", Sopir adalah laki-laki maka dibayar lebih tinggi dari pada pembantu rumah tangga yang perempuan, mesti tidak ada yang menjamin bahwa pekerjaan sopir lebih berat dari pekerjaan PRT.
4. *Violence* (kekerasan), pemerkosaan, pemukulan pelecehan, Perempuan menjadi korbannya karena dianggap secara fisik lemah.
5. Beban kerja berlebih (*triple role*): peran produktif, reproduktif, dan peran sosial.
6. Semua manifestasi ketidakadilan gender ini saling terkait dan secara dialektika saling mempengaruhi.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan (holistik) kuantitatif dan kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah. Waktu penelitiannya dimulai dari bulan September sampai dengan Desember 2008. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metoda analisa yang digunakan adalah analisis diskriptif explanasi.

D. ANALISA DATA

Area dan Demografis Wilayah Kajian

Secara administratif Kabupaten Wonosobo memiliki 15 kecamatan yang terdiri dari 236 wilayah desa dan 29 wilayah kelurahan, serta memiliki luas wilayah 98.468 hektar (sumber:

BPS Wonosobo tahun 2006). Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah.

Ketenagakerjaan Wilayah Kajian

Kabupaten Wonosobo memiliki unit usaha industri rumah tangga/kecil dan menengah pada tahun 2006 sejumlah 10.371 unit, dengan menyerap 21.257 orang pekerja, adapun jenis produksi yang dihasilkan dari sektor ini usaha olahan pangan, sandang dan kulit, kerajinan, logam, sektor usaha olahan pangan merupakan yang tertinggi yaitu 60% dari seluruh unit industri kecil yang ada dan semuanya bertumpu pada olahan pangan (hasil pertanian).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo diperoleh dari sektor pertanian dan industri, kedua sektor tersebut merupakan penyangga utama perekonomian. Posisi Industri Kabupaten Wonosobo tahun 2006, jumlah unit usaha adalah 10.379 unit, Jumlah tenaga kerja yang terserap 25.150 orang. Nilai investasi sejumlah Rp106.574.592.000,- adapun nilai produksinya Rp460.580.000,- Dengan nilai investasi Rp16.325.226.000,- Nilai Produksi Rp219.195.667.000,- Industri Kecil di Kabupaten Wonosobo dikelompokkan menjadi 315 sentra, yang terdiri dari sentra industri pangan, sandang, bahan bangunan, logam dan industri kerajinan.

Analisis Kajian Gender

Pada umumnya PUMKM di Kabupaten Wonosobo adalah pekerja keras. Mereka berusaha karena ingin melestarikan usaha keluarga (warisan keluarga) selain itu ada juga yang ingin berusaha sendiri karena suaminya meninggal, pergi

atau tidak mempunyai pekerjaan tetap. Usaha yang ditekuni 75% responden sudah berumur lebih dari 10 tahun. Usahanya dilaksanakan secara individu dan di rumah, ketrampilan diperoleh dengan cara berusaha sendiri dan pengalaman dari orang tua. Sedangkan pola kerja mereka untuk aktivitas usaha masih tetap dengan melaksanakan dan mengutamakan aktivitas keluarga atau rumah tangga terlebih tempat usaha yang menjadi satu atau berdekatan dengan rumah. Selain itu, bagi mereka kesuksesan yang didapat tidak serta merta meninggalkan peran domestiknya. Bagi pengusaha perempuan keberhasilan mereka tunjukkan dengan keberhasilan dalam pendidikan anak-anaknya. Mereka tidak menginginkan anaknya memiliki pendidikan yang rendah dan diharapkan pendidikan minimal sama dengan mereka bahkan lebih.

Pendampingan bagi PUMKM sebagian besar dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi di Kabupaten dan Kota masing-masing. Namun demikian, ada juga Kabupaten atau Kota dalam pendampingan UKM dilakukan oleh LSM, Koperasi dan Lembaga Perbankan. Hampir semua PUMKM sudah paham tentang pendampingan dan merasakan manfaat adanya pendampingan. Pendampingan yang diharapkan tidak hanya berupa permodalan tetapi dibutuhkan juga pendampingan teknis (pengusaha kerajinan bordir, batik, jenang, makanan). Selain itu pendampingan manajemen juga sangat dibutuhkan. Hal ini nampak pada pengusaha mikro yang belum mampu memisahkan antara manajemen (keuangan) rumah tangga dan manajemen usaha. Kondisi ini yang menyebabkan usaha relatif bersifat stagnan (tidak berkembang) meskipun usaha yang dilakukan sudah cukup lama (lebih dari 10 tahun dan usaha berada di lokasi

yang sangar strategis).

Aktor yang mendampingi PUMKM yang ada di daerah kajian antara lain berupa; LSM, LPTP, ASPUK dan Koperasi. Dari pemerintah pendampingan usaha antara lain; DKRPP-KB, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pendampingan yang diutamakan seharusnya adalah PUMKM yang lemah, miskin, kecil dan terpinggirkan serta perempuan yang menjadi korban budaya patriarki. Oleh karena itu, pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi seharusnya melakukan: identifikasi atau membuat data pilah UMKM perempuan dan laki-laki (responsif gender), mengevaluasi dan melakukan kebijakan UMKM yang responsif gender, memfokuskan keterpihakan pada pengembangan UMKM dalam segala bidang.

Model pendampingan adalah pendamping mempunyai tanggung jawab berdasarkan wilayah. Satu wilayah mencakup satu kecamatan, pendampingannya melalui jaringan perempuan usaha kecil (JarPUK). Program pendamping dibuat berdasarkan kebutuhan dari bawah menurut kebutuhan PUMKM dan pendampingan bersifat proaktif (jemput bola) serta dengan birokrasi yang sederhana.

Dampak UMKM bagi perempuan, dengan adanya perempuan bekerja sangat membantu ekonomi keluarga karena hasil yang diperoleh rata-rata per bulan Rp1.000.000,- sehingga perempuan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya maupun keluarga. Namun demikian, pada perempuan bekerja "usaha" mereka memiliki beban kerja yang lebih banyak dibanding bila tidak berusaha. Penggunaan sumber daya keluarga berupa anggota keluarga membantu maka beban tersebut menjadi relative lebih baik dan ini merupakan

keberhasilan perempuan. Tantangan lain bagi perempuan berusaha adalah cara mereka mengembangkan usahanya. Banyak diantara mereka menganggap bahwa berusaha hanya sekedar sambil dan pelarian bukan wujud aktualisasi dirinya. Artinya usaha bukan merupakan pilihan tetapi keterpaksaan. Selain itu adanya PUMKM bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Pada lingkup keluarga dampak usaha yang dilakukan oleh perempuan adalah pekerjaan rumah tangga (domestik). Untuk melaksanakan pekerjaan rumah tangga, termasuk mengasuh anak, membersihkan rumah; mencuci menjadi tanggung jawab bersama antara ibu dan bapak. Pada umumnya responden sudah mempunyai tanah, kendaraan, perhiasan serta mampu menunaikan ibadah (haji) dari aktivitas usaha yang dilakukan. Keputusan penggunaan uang keluarga dilaksanakan secara musyawarah antara ibu dan bapak. Penggunaan uang untuk keperluan rumah tangga dan keperluan usaha sudah dipisahkan bagi pengusaha perempuan kelas menengah, sehingga kondisi PUMKM relatif sudah profesional dan demokratis. Namun bagi PUMKM pada tataran mikro keuangan dan manajemen rumah tangga belum terpisah dengan keuangan usaha. Hal ini sulit dilakukan karena kebutuhan dan keberlangsungan hidup mereka sangat tergantung dari usaha yang dilakukan.

E. PENUTUP

Simpulan

Penelitian terkait Perempuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini dilakukan di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Di Kabupaten Wonosobo belum mempunyai data pilah terkait

keberhasilan perempuan. Tantangan lain bagi perempuan berusaha adalah cara mereka mengembangkan usahanya. Banyak diantara mereka menganggap bahwa berusaha hanya sekedar sambilan dan pelarian bukan wujud aktualisasi dirinya. Artinya usaha bukan merupakan pilihan tetapi keterpaksaan. Selain itu adanya PUMKM bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Pada lingkup keluarga dampak usaha yang dilakukan oleh perempuan adalah pekerjaan rumah tangga (domestik). Untuk melaksanakan pekerjaan rumah tangga, termasuk mengasuh anak, membersihkan rumah; mencuci menjadi tanggung jawab bersama antara ibu dan bapak. Pada umumnya responden sudah mempunyai tanah, kendaraan, perhiasan serta mampu menunaikan ibadah (haji) dari aktivitas usaha yang dilakukan. Keputusan penggunaan uang keluarga dilaksanakan secara musyawarah antara ibu dan bapak. Penggunaan uang untuk keperluan rumah tangga dan keperluan usaha sudah dipisahkan bagi pengusaha perempuan kelas menengah, sehingga kondisi PUMKM relatif sudah profesional dan demokratis. Namun bagi PUMKM pada tataran mikro keuangan dan manajemen rumah tangga belum terpisah dengan keuangan usaha. Hal ini sulit dilakukan karena kebutuhan dan keberlangsungan hidup mereka sangat tergantung dari usaha yang dilakukan.

E. PENUTUP

Simpulan

Penelitian terkait Perempuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini dilakukan di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Di Kabupaten Wonosobo belum mempunyai data pilah terkait

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), data-data atau dokumen-dokumen yang ada bersifat netral atau bahkan bias gender.

Bagi pengusaha mikro sikap "nrimo", ketidakberdayaan untuk mengembangkan usahanya, terlebih bila terkait dengan permodalan, kekhawatiran dan kecurigaan bila harus berhubungan dengan perbankan atau pemberi modal. Peran bapak masih penting dalam pengambilan keputusan di organisasi. Pekerjaan rumah tangga dikerjakan secara bersama-sama dan usaha yang dilakukan merupakan usaha warisan keluarga dan atau pengalaman individu.

Motivasi PUMKM dalam melakukan usahanya antara lain: menambah penghasilan keluarga, meneruskan usaha keluarga, mencari aktivitas yang positif, memberdayakan perempuan di sekitar rumahnya, meningkatkan ketrampilan, ingin menjadi pengusaha sukses, ingin menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. PUMKM pada umumnya pernah mengalami kegagalan dalam berusaha tetapi mereka tidak putus asa karena kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda atau menjadi pengalaman yang terbaik sehingga mereka berusaha untuk bangkit lagi.

Identifikasi kebutuhan PUMKM dilihat dari hambatan yang dialami oleh rata-rata PUMKM yaitu **pertama**, kesulitan memperoleh karyawan yang terampil.. **Kedua**, kesulitan memperoleh peralatan yang modern. **Ketiga**, hambatan paling banyak adalah kesulitan memperoleh modal secara mandiri yaitu harus seijin suami. Sedangkan, faktor pendukung adanya pendampingan dari JarPUK sangat membantu pemasaran, modal, dan pelatihan manajemen usaha kecil dan Koperasi atau lembaga keuangan dalam kemudahan memperoleh modal.

Selain itu, didukung oleh kebijakan pemerintah daerah untuk mengembangkan PUMKM atau kebijakan pemerintah terkait UKM yang responsif gender.

Kelembagaan lembaga pendampingan PUMKM, dalam akses terhadap permodalan masih menempatkan perempuan sebagai subordinat, artinya perempuan belum leluasa mengakses permodalan secara mandiri tanpa penjaminan (penjaminan) dari suaminya. Hanya pada pengusaha yang berstatus *single* (janda) maka penjaminan tidak diperlukan. Namun demikian jaminan terhadap pinjaman yang diajukan sering tidak sepadan dengan jumlah pinjaman yang diajukan. Selain itu birokrasi yang dirasa cukup sulit bagi perempuan pengusaha mikro.

Saran

Adapun saran untuk penelitian ini adalah

1. Meningkatkan perhatian terhadap PUMKM yang lemah, miskin, mikro, kecil, menengah dan terpinggirkan serta perempuan yang menjadi korban budaya patriarki.
2. Sebaiknya pemerintah berusaha memberikan modal dengan bunga yang sangat lunak dan birokrasi yang mudah sehingga bias gender bisa teratasi.
3. Sebaiknya pendamping meningkatkan pelatihan-pelatihan yang bisa mengembangkan PUMKM maupun sumberdaya manusia pelaku PUMKM.
4. Perlunya pendampingan hukum bagi pengusaha perempuan, asosiasi (paguyupan) agar tidak dimanfaatkan dan mengalami ketidakadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Tatik, CH. 1997, Dikutip dari *TOR Jambore Perempuan Usaha Kecil tahun 2002*, Surakarta
- Jim Schell, 1996, *Small Business Answer Book* (dalam Andriani dkk, Konsep Dasar Pelatihan Manajemen Mikro-bisnis), PERSEPSI dan Jigrah, Semarang, Limpard.
- Andriani, S, Soemantri, Linda Gumeulis dan Denny, 2000, *Memotong Jerat Tradisi*, Semarang, Limpad
- Fakih, Mamsour, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Edy Priyono, dkk, 1999, *Identifikasi dan Analisis Faktor-faktor yang menghambat dan Mendorong Dinamika Perempuan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Perspektif Gender*, CESS & Swisscontact, SMEP.